

AUKUS DAN POLITIK KEAMANAN INTERNASIONAL AUSTRALIA

2013 - 2022

PROPOSAL SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

ANDHIKA SAEDYA PRIYADI

19323222

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN
AUKUS DAN POLITIK KEAMANAN INTERNASIONAL
AUSTRALIA
2013 - 2022

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam
memperoleh derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



- Dewan Penguji
1. Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A.
 2. Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.
 3. Mohammad Rezky Utama, S.IP., M.Si.

Tanda Tangan

Hangga Fathana

Karina

Mohammad Rezky Utama

Pernyataan Integritas Akademik

Dengan ini saya menyatakan bahwa proposal tugas akhir ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 13 Juli 2023



Andhika Saedy Priyadi

DAFTAR ISI

PROPOSAL SKRIPSI	1
Pernyataan Integritas Akademik	2
DAFTAR ISI	3
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Cakupan penelitian	8
1.5 Tinjauan Pustaka	9
1.7 Kerangka Pemikiran	14
1.7 Argumen Sementara	15
1.8 Metode Penelitian	15
1.9 Sistematika Pembahasan	16
BAB II	
FORWARD DEFENCE : KONTEKS KEAMANAN INTERNASIONAL AUSTRALIA	18
2.1 Australian Forward Defence	19
2.1.1 Hubungan Australia dengan Amerika, Selandia Baru dan Inggris terhadap Forward Defence	20
2.1.2 Konteks Forward Defence Dalam ANZUS dan AUKUS	21
2.1.3 Tantangan dari Keterlibatan ANZUS dan AUKUS dalam Forward Defence	22
2.1.4 Implementasi Strategi Forward Defence 2013 - 2022	23
2.2 Australian Defence White Paper	26
2.2.1 Defence White Paper memandang Tiongkok	27
2.2.2 Defence White Paper memandang Amerika Serikat	27
2.2.3 Defence White Paper memandang Inggris	28
2.2.4 Defence White Paper memandang Selandia Baru	29
2.3 Dampak Defence White Paper terhadap Forward Defence di Australia	29
2.4 Keterlibatan Defence White Paper dalam keamanan Australia	31
BAB III	
AUSTRALIAN REALISM	32
3.1 Posisi Australian Realism dalam Classical Realism	33
3.2 Prudence	35
3.3 Powerlessness	39
3.3.1 Populate or Perish	39

3.3.2 Kekuatan militer Australia dalam konteks Powerlessness	41
3.3.3 Ekonomi Australia dalam konteks Powerlessness	42
3.3 Avoidance	42
BAB IV	
PENUTUP	49
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Rekomendasi Penelitian	54
DAFTAR PUSTAKA	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Aplikasi variabel Prudence dalam Australian Realism	37
Tabel 2 Aplikasi variabel Avoidance dalam Australian Realism	43
Tabel 3 Aplikasi Teori Australian Realism	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

AUKUS (Australia, United Kingdom, and United States) adalah sebuah akronim dari pakta keamanan di kawasan Asia-Pasifik antara tiga negara: Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Pengumuman mengenai hal ini dibuat pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 dalam konferensi video bersama oleh masing-masing kepala dari 3 pemerintahan. Saat Australia sedang melakukan persiapan untuk pemilihan nasional, Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan kepada para pemilih bahwa perluasan pakta pertahanan AUKUS untuk memasukkan pembangunan rudal hipersonik akan memastikan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik dan meningkatkan keamanan ekonomi negara.

AUKUS mungkin dapat mewakili integrasi kemiliteran dan ekonomi Australia, tetapi tidak dapat semuanya tidak dapat dilakukan secara bersamaan, dan hal kemiliteran lah perlu diutamakan dikarenakan adanya gerakan oleh China. Australia membutuhkan arsitektur keamanan baru, tetapi tidak dengan yang sama seperti NATO, pakta pertahanan AUKUS ini akan terdiri dari banyak pengelompokan yang berkesinambungan, masing-masing dengan peran dan kekuatannya masing-masing.

Dengan pengelompokan yang berbeda yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang berbeda, Quad (AS, Australia, India, dan Jepang) akan tetap mementing untuk mengkoordinasikan kebijakan strategis dari pesaing regional di China, untuk menghadirkan visi bersama tentang tatanan regional, dan untuk

bertindak sebagai inti untuk kerja sama yang lebih luas, dan Quad telah menegaskan bahwa visi luasnya untuk memperkuat kawasan Indo-Pasifik yang terbuka.

Dengan adanya AUKUS, keberadaan ANZUS dipertanyakan, ANZUS yang merupakan Perjanjian Keamanan Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Ini adalah perjanjian pertahanan kolektif antara ketiga negara yang ditandatangani pada tahun 1951. Perjanjian ANZUS adalah kerja sama keamanan di wilayah Pasifik dan mewajibkan setiap negara anggota untuk mendukung satu sama lain ketika terjadi serangan bersenjata di wilayah Pasifik.

Dalam perjanjian ini, Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru setuju untuk berkonsultasi satu sama lain tentang masalah yang saling berkaitan, termasuk masalah politik, ekonomi, dan keamanan. Perjanjian ini juga menyediakan perencanaan militer dan pelatihan bersama, serta kemungkinan tindakan militer gabungan dalam hal terjadi serangan.

Namun, pada tahun 1985, Selandia Baru menolak masuknya kapal Angkatan Laut AS dengan senjata nuklir, dan AS menanggukkan kewajibannya di bawah perjanjian terhadap Selandia Baru. Sejak saat itu, ANZUS tetap berlaku sebagai pengaturan keamanan antara AS dan Australia, tetapi tanpa keterlibatan Selandia Baru. Dan hingga saat ini ANZUS masih merupakan perjanjian yang sah antara Amerika Serikat dan Australia. ANZUS telah berlanjut sebagai pengaturan keamanan bilateral antara Amerika Serikat dan Australia saja. Meskipun perjanjian ini masih tetap berlaku, cakupannya dan relevansinya telah berkembang seiring waktu, dan aplikasi praktisnya telah dibatasi pada konsultasi dan kerja sama dalam berbagai masalah keamanan di wilayah Pasifik.

Perbedaan kunci lain antara ANZUS dan AUKUS adalah keterlibatan Selandia Baru. Sementara Selandia Baru adalah pihak yang menandatangani ANZUS, Selandia Baru tidak terlibat dalam AUKUS. Selain itu, ANZUS fokus terutama pada pertahanan kolektif, AUKUS lebih berfokus pada pengembangan dan berbagi teknologi pertahanan.

Masalah AUKUS dan SSN keduanya salah mengartikannya potensi gangguan bagi kawasan. Pandangan pertama, diumumkan 8 SSN di angkatan laut Australia dapat secara signifikan memberikan keseimbangan kekuatan militer yang mendukung Amerika (yang armada SSN saat ini ada di atas 50, untuk melawan China). Namun, sementara Grup Angkatan Laut Perancis (dan American Lockheed Martin) diharapkan untuk mengirimkan kapal selam konvensional pertama di awal 2030-an, Australia sekarang harus menunggu setidaknya satu dekade untuk SSN pertama yang akan dikirimkan. Sudah ada pembicaraan tentang penyewaan SSN ke Australia untuk mengisi kesenjangan tersebut. Selain itu, membangun fasilitas pelabuhan dan melatih insinyur nuklir kapal selam juga akan memakan waktu lebih lama dari proposal awal yang diberikan Prancis (Julienne, 2021).

Armada kapal selam nuklir di bawah kemitraan AUKUS diperkirakan akan memakan biaya Australia sebanyak 171 miliar dolar Australia (USD 121,7 miliar) dan tidak akan dikerahkan setidaknya selama dua dekade, menurut laporan dari Australian Strategic Policy Institute (ASPI). Investasi pertahanan dan militer Australia telah meningkat anggaran AUKUS, Morrison berkomitmen untuk investasi senilai AUD 9,9 miliar (USD 7,5 miliar).

Sebagian besar dana publik Australia masuk ke dalam industri persenjataan, dengan tambahan AUD 270 miliar, di atas anggaran pertahanan yang dialokasikan, yang dialokasikan antara tahun 2020 dan 2030, analisis militerisme dan perdagangan senjata Australia Michelle Fahy mengutip penelitiannya baru-baru ini untuk Australian Democracy Network. Michelle Fahy mengatakan ibu kota Australia Canberra berada di kompleks industri militer menurut penelitian *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI) yang menunjukkan akan menjadi Australia menjadi tuan rumah jumlah anak perusahaan terbesar kedua dari 15 produsen senjata global.

Terdapat reaksi beragam dari negara-negara di Indo-Pasifik terhadap AUKUS. China berpendapat bahwa AUKUS “telah secara serius merusak perdamaian dan stabilitas regional”. Juru bicara kementerian luar negeri China, Zhao Lijian, melanjutkan dengan mengatakan bahwa “mengintensifkan perlombaan senjata dan merusak internasional upaya non-proliferasi.” China menuduh ketiga negara itu mengabaikan standar non-proliferasi nuklir dan berpegang pada "Perang Dingin" (Lijian, 2021).

Dan bagi Malaysia dan Indonesia memiliki kekhawatiran bahwa perjanjian ini akan memicu perlombaan senjata di kawasan, berpotensi meningkatnya risiko konflik. Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri Yaakob, mengatakan proyek itu bisa “memprovokasi kekuatan lain untuk mengambil tindakan yang lebih agresif di wilayah ini, terutama di Laut Cina Selatan.” Pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa mereka memandang pakta itu "dengan hati-hati" dan "sangat" prihatin atas perlombaan senjata dan proyeksi

kekuatan yang berkelanjutan di wilayah (Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, 2021).

Lalu ada Menteri Luar Negeri Filipina yang mengatakan AUKUS akan memberikan “ketidakseimbangan” militer di Asia Tenggara, meskipun tidak secara langsung menyebut negara tertentu sebagai yang bertanggung jawab atas ketidakseimbangan ini. Teodoro Locsin Jr mengatakan ada ketidakseimbangan dalam kekuatan tersedia untuk negara-negara anggota ASEAN dan “peningkatan hubungan dekat luar negeri” kemampuan sekutu untuk memproyeksikan kekuatan harus memulihkan dan menjaga keseimbangan (Benar, 2021).

Selanjutnya Jepang yang menyambut baik pembentukan pakta pertahanan AUKUS. Menteri Luar Negeri Toshimitsu Motegi mengatakan itu memperkuat keterlibatan di wilayah tersebut. Profesor Tetsuo Kotani dari Meikai University mengatakan kepada Komite Pertahanan bahwa sementara Jepang memahami implikasi strategis dari keputusan tersebut, sangat disayangkan tiga negara tidak berurusan dengan Prancis dengan cara yang berbeda, menunjukkan perpecahan yang dihasilkan dapat mendorong China (Defence Committee, 2021).

Pada 20 September 2021 Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Boris Johnson membahas kesepakatan AUKUS dalam pertemuan PBB. Menurut juru bicara kepresidenan Park Kyung-mee, Perdana Menteri mengatakan kepada Presiden Moon bahwa "AUKUS tidak akan menimbulkan masalah regional" dan Mr Moon menjawab, "Saya berharap AUKUS akan berkontribusi pada regional perdamaian dan kemakmuran." Pernyataan itu ada sebagai sikap netral pada pakta tersebut (The Korea Times, 2021).

India dengan mengamati tentang AUKUS secara diam-diam, dan Tanvi Madan dari US based Brookings Institution, mengatakan AUKUS kemungkinan akan dilihat secara positif oleh India. Madan mengatakan India memiliki keprihatinan mendalam tentang tindakan dan niat China, dan AUKUS menandakan penegasan kembali komitmen negara-negara mitranya terhadap wilayah (Lawfare, 2021).

Mayoritas warga Australia mendukung langkah Scott Morrison untuk membangun hubungan yang kuat dengan Amerika Serikat dan Inggris untuk menopang pertahanan nasional Australia, tetapi responden dalam jajak pendapat Guardian Essential terbaru juga khawatir kemitraan Aukus yang baru akan mengganggu hubungan dengan China dan Eropa.

Survei terhadap 1.200 responden menunjukkan 52% percaya Australia melakukan hal benar untuk melakukan kesepakatan kapal selam nuklir dengan AS dan Inggris, dan 52% setuju dengan pernyataan: “AUKUS bertujuan untuk kepentingan keamanan dan ekonomi terbaik Australia.”

Tetapi 7% berpikir pengaturan itu akan semakin mempertaruhkan hubungan dengan China dan membuat Australia lebih tidak aman, dapat dilihat dari sikap pemerintah Prancis terhadap keputusan Morrison untuk membatalkan kontrak kapal selam senilai \$90 miliar dengan Naval Group, dan 22% berpikir AUKUS tidak akan memberikan perubahan yang signifikan terhadap Australia (Lowy Institute, 2021).

Sementara pakta kapal selam AUKUS jelas merupakan tanggapan terhadap meningkatnya militerisasi China di Indo-Pasifik yang dapat mengacaukan kawasan dan membahayakan kepentingan AS, data lama

menunjukkan sebagian besar warga Australia tidak menyukai konfrontasi dengan Beijing dan data terbaru menunjukkan sebagian besar warga Australia setuju AUKUS dilakukan demi kepentingan keamanan dan ekonomi di Australia.

Saat Morrison berada di AS pada tanggal 20 September 2021 lalu untuk bertemu Joe Biden dan Boris Johnson, dan terlibat dalam pembicaraan pertahanan dengan Quad (sebuah kelompok informal antara AS, Australia, India, dan Jepang) dan perpecahan terjadi dalam Koalisi tentang apakah pemerintah harus mengadopsi target pengurangan zero emission atau tidak pada tahun 2050.

Ketika responden ditanya sejauh mana mereka akan mendukung atau menentang penggunaan energi nuklir, 47% mendukung kapal selam bertenaga nuklir 21% menentang dan 48% mendukung tenaga nuklir 24% menentang, sementara 29% mengatakan mereka akan mendukung senjata nuklir dan 38% menentang (Murphy, 2021) (Allan Behm, 2021).

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji peran Australia dalam menentukan strategi dalam menghadapi dilema di dalam kedua pakta pertahanan tersebut sehingga dapat memperkuat posisinya dalam menghadapi potensi ancaman di masa depan. Australia akan melakukan *Forward Defence* dengan sangat hati-hati, dengan mempertimbangkan risiko dan peluang yang ada dalam memilih kebijakan terkait kedekatannya dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Selandia Baru. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana strategi *Forward Defence* dapat mempengaruhi kepentingan Australia dalam situasi kawasan Indo-Pasifik, di mana persaingan keamanan semakin ketat dan setiap negara berlomba-lomba untuk memperkuat posisinya dalam menjaga keamanan dan stabilitas kawasan.

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa Australia membuat pakta pertahanan AUKUS ketika ANZUS masih berfungsi di tahun 2013 - 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

Pada saat AUKUS diumumkan pada tanggal 15 September 2021, banyak masyarakat Australia tidak setuju dengan pakta ini, bahkan negara-negara lain juga tidak setuju dan merasa akan dirugikan dengan adanya pakta ini, sedangkan ANZUS masih berfungsi. Tujuan umum penelitian dan dalam penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pakta pertahanan AUKUS yang dipersetujui oleh tiga negara yaitu Australia, Inggris, dan Amerika Serikat dan ANZUS yang dipersetujui oleh Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Sedangkan tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan dan penyebabnya AUKUS diberlakukan saat ANZUS masih berjalan dan berfungsi.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian berfokus pada analisis faktor internal dan external yang menyebabkan berkeputusan membuat pakta pertahanan Australia AUKUS saat ANZUS masih digunakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan berdasarkan perbandingan atau komparasi alasan mengapa Australia setuju dengan membuat AUKUS yang diumumkan pada 15 September 2021, dikarenakan perjanjian ANZUS masih berlaku antara Amerika

Serikat dan Australia. Meskipun perjanjian ini ditandatangani pada tahun 1951, namun masih berlaku hingga saat ini. Perjanjian ini terus menjadi kerangka penting untuk kerja sama di berbagai masalah keamanan di wilayah Pasifik, dan memberikan dasar bagi kedua negara untuk berkonsultasi dan berkoordinasi satu sama lain dalam menghadapi ancaman keamanan, hingga saat ini dengan dua hal, yaitu kerangka teoritis mengenai pendapat aktor yang bersangkutan yaitu pemerintahan Australia atau Commonwealth Government. Hasil penelitian akan memberikan informasi apakah aktor dan pemerintah yang bersangkutan dalam pakta pertahanan tersebut menjadi alasan mengapa AUKUS diberlakukan saat ANZUS masih berjalan dan berfungsi dan apakah selaras dengan negara-negara lain terutama negara-negara kawasan Indo-Pasifik.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penulisan penelitian ini akan dikaitkan dengan beberapa karya ilmiah terdahulu, sehingga akan didapatkan kaitannya dengan karya ilmiah diatas. Pertama, artikel penelitian yang dibuat oleh M. Cheng, dengan judul *AUKUS: The Changing Dynamic and Its Regional Implications* 3 Februari 2022. Artikel penelitian ini membahas tentang perubahan dinamik mengenai penjelasan apa itu fungsi AUKUS dan implikasinya terhadap kawasan, komponen tenaga kemiliteran Australia, pengertian AUKUS itu sendiri beserta tujuan dan manfaatnya. Adapun hasil dari penelitian ini ialah perencanaan kapal selam bertenaga nuklir, menjelaskan mengapa AUKUS butuh tiga negara ini untuk melakukan persetujuan pertahanan kemiliteran ini, dan di artikel ini menganalisis perubahan strategi global Amerika untuk memperkuat kekuatan kemiliteran di

Kawasan Indo-Pasifik. Pembangunan di kawasan Asia Pasifik dan Samudra Hindia membutuhkan perdamaian dan kerja sama yang cukup erat, dan dapat dilihat dari upaya negara-negara kawasan Indo-Pasifik, selama bertahun-tahun, Indo-Pasifik telah menjadi kawasan paling dinamis dan menjanjikan di dunia dan mesin utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi dunia (Cheng 2021).

Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana perdamaian, pembangunan dan kerja sama adalah visi bersama kawasan Asia-Pasifik. Untuk mencapai tujuan, apalagi dalam konteks pandemi, para aktor di kawasan, terutama kekuatan negara-negara dengan kekuatan besar, harus meninggalkan Konsep Perang Dingin, memberhentikan pencegahan militer dan konfrontasi bersenjata, dan hindari dorongan perlombaan senjata dan mengganggu ketertiban daerah. Beberapa kekuatan barat, terutama yang disebut demokrasi Anglophone, juga terobsesi dengan itu mereka tidak bisa kehilangan kendali. Mereka masih berpegang teguh terhadap konsep geopolitik yang sempit dan gagal memperlakukan memajukan negara-negara berkembang, termasuk Cina. Sejarah Asia Pasifik yang berkembang menunjukkan bahwa perdamaian di kawasan tidak pernah datang dengan mudah dan seharusnya sebagaimana dihargai oleh semua pihak yang terkait. Dan yang terakhir, karya ilmiah ini juga menjelaskan bagaimana AUKUS hanya akan memunculkan masalah baru yang bukan berdasarkan kepentingan regional dan Asia-Pasifik dan akan penuh dengan bencana yang tidak akan kunjung selesai.

Kedua, karya Ilmiah Marc Julienne, ketua riset negara Tiongkok di *Ifri's Center for Asian Studies* dengan judul: *AUKUS Rocks the Boat in the Indo-Pasific*. Karya Ilmiah ini membahas tentang pengertian dan fungsi AUKUS

yang bisa mengguncang kestabilan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik terutama dalam bidang pertahanan dan kemiliteran. Adapun hasil dari penelitian ini adalah penerapan strategi kemiliteran AUKUS dan dampaknya di beberapa kawasan tidak hanya di Australia, baik dari segi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan tanggapan-tanggapan negara kawasan di Indo-Pasifik (Julienne, 2021).

Ketiga, riset yang dilakukan Louisa Brooke-Holland, John Curtis, dan Claire Mills dengan judul *The Aukus Agreement*. Riset ini menjelaskan keseluruhan tentang pakta pertahanan AUKUS lebih mendalam, mulai dari pertama kali AUKUS diumumkan ke publik pada 15 September 2022, hingga menjelaskan dengan mendetail tanggapan-tanggapan negara kawasan, dan alasan-alasan mengapa negara-negara tersebut setuju dan tidak setuju terhadap AUKUS, dengan tambahan reaksi beberapa negara di Eropa (Louisa, 2021).

Jadi dari tinjauan pustaka tersebut dapat ditemukan titik persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti teliti. Adapun titik persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pakta pertahanan AUKUS. Perbedaannya yaitu terletak di aspek penyampaian yang dibahas, diantaranya yaitu tentang aspek-aspek yang membuat AUKUS disetujui dan tidak disetujui dan pandangan-pandangan negara lain terhadap AUKUS. Sedangkan penelitian ini lebih terfokus kepada bagaimana ANZUS yang dimana masih dilakukan dan berfungsi dan Australia menambah AUKUS kedalam politik keamanan internasionalnya.

Keempat, jurnal yang dibuat oleh Michael Wesley dengan judul *The Rich Tradition of Australian Realism*, Jurnal ini menjelaskan tradisi realisme Australia,

yang digambarkan sebagai pendekatan khas dalam mewakili pengalaman Australia. Wesley berargumen bahwa realisme di Australia memiliki akar dalam pengalaman kolonialisme dan perjuangan untuk membangun identitas nasional. Wesley menelusuri perkembangan realisme Australia dari awal abad ke-19 hingga manifestasinya saat ini.

Michael Wesley mengidentifikasi tiga tema utama dalam realisme Australia: *Prudence*, *Powerlessness*, dan *Avoidance*. Michael Wesley juga membahas peran realisme dalam membentuk identitas budaya Australia. Wesley berargumen bahwa realisme telah menjadi sarana penting dalam menciptakan pemahaman bersama tentang pengalaman Australia, namun, Wesley juga mencatat bahwa realisme telah menjadi subjek kritik, terutama karena batasan dan kepicikan pandangannya yang dianggap sempit (Wesley, 2009).

Jurnal ini menyimpulkan bahwa realisme Australia terus menjadi tradisi yang vital dan berpengaruh di Australia. Wesley menyarankan bahwa tradisi ini ditandai oleh komitmen pada kebenaran dan keaslian, pengakuan atas kompleksitas dan keragaman pengalaman Australia, dan kesiapan untuk menghadapi tantangan dan kontradiksi masa lalu dan sekarang bangsa tersebut.

Kelima, jurnal yang dibuat oleh Malcolm Davis dengan judul *Forward defence in depth for Australia*, Jurnal ini membahas tentang konsep *forward defence* adalah strategi yang diadopsi oleh Australia dalam menghadapi ancaman keamanan di kawasan Asia-Pasifik. Strategi ini mencakup penggunaan kekuatan militer dan diplomasi untuk menghadapi ancaman keamanan di luar wilayah Australia, dan juga menempatkan pasukan dan sumber daya pertahanan di daerah-daerah strategis di sekitar Australia.

Davis menyoroti pentingnya *forward defence* dalam melindungi Australia dari ancaman yang datang dari luar kawasan, terutama dari Tiongkok. Davis mengemukakan bahwa strategi ini memungkinkan Australia untuk mengambil langkah preventif dan menyelesaikan masalah keamanan sebelum ancaman tersebut mencapai wilayah Australia. Selain itu, Davis juga menekankan pentingnya kerja sama antara Australia dan negara-negara sekutu, seperti Amerika Serikat, Jepang, dan India, dalam menerapkan strategi *forward defence* ini. Ia berargumen bahwa kerja sama regional dapat memperkuat posisi Australia dalam menghadapi ancaman keamanan di kawasan Asia-Pasifik (Davis, 2019).

Keenam, analisis yang dilakukan oleh Major Jeremy “JB” Brown yang berjudul *An Analysis of Australian Defence Policy from 1901 to Present* yang menjelaskan Australia terus beradaptasi dengan lingkungan keamanan yang semakin kompleks, terutama terkait dengan peningkatan kekuatan militer Tiongkok dan ketidakpastian regional yang disebabkan oleh perubahan dalam politik luar negeri Amerika Serikat. Kebijakan Australia saat ini, termasuk bergabung dengan AUKUS dan ANZUS, mencerminkan usaha untuk mempertahankan kepentingan nasional dan memperkuat hubungan strategis dengan mitra-mitra penting di kawasan Indo-Pasifik. Tulisan ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang evolusi kebijakan pertahanan Australia, serta menyoroti pentingnya strategi yang tepat dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks di kawasan Indo-Pasifik dan di seluruh dunia.

1.7 Kerangka Pemikiran

Australian Realism memiliki banyak kesamaan dengan realisme pada umumnya, dalam hal menggambarkan secara realistis, ada beberapa perbedaan penting antara kedua teori. Pertama *Prudence*, konsep ini mengacu pada kemampuan dan kesiapan Australia untuk mengidentifikasi, mencegah, dan merespons ancaman keamanan yang mungkin terjadi. Hal ini mencakup upaya untuk memperkuat kemampuan keamanan dan pengawasan, serta meningkatkan kerja sama dengan negara-negara lain dalam hal keamanan. Kedua *Powerlessness*, konsep ini mengacu pada situasi di mana Australia mungkin tidak memiliki kekuatan atau sumber daya yang cukup untuk mengatasi ancaman keamanan tertentu. Untuk mengatasi masalah ini, Australia dapat mencari dukungan dari negara-negara mitra atau mengembangkan kemampuan militer dan teknologi yang lebih maju. Ketiga *Avoidance*, konsep penghindaran mengacu pada strategi Australia untuk menghindari konflik dan ancaman keamanan sebisa mungkin. Hal ini meliputi upaya untuk memperkuat diplomasi dan hubungan internasional, serta mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan sekitar. Dalam konteks Australia, penghindaran dapat membantu mengurangi kemungkinan konflik militer dan mendorong kerja sama dalam hal keamanan regional. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidaksetaraan sosial atau ekonomi, diskriminasi, dan penindasan politik (Wesley, 2009).

Menurut definisi teori Realisme Australia, setiap aturan yang dibuat diselesaikan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan risiko dan manfaat dari pengambilan keputusan itu. Seperti yang dikatakan oleh Michael Wesley, perspektif realis dan konstruktivis untuk menganalisis dinamika kekuatan yang

berubah di Asia dan tantangan yang dihadapi kawasan ini di abad ke-21. Dia berpendapat bahwa sementara realisme memberikan kerangka yang berguna untuk memahami hubungan kekuasaan dan peran negara di wilayah tersebut, penting juga untuk mempertimbangkan peran budaya, sejarah, dan identitas dalam membentuk dinamika ini (Wesley, 2009).

Teori ini menyatakan bahwa negara menggunakan kepentingan pribadi mereka untuk membuat pilihan yang akan memberi mereka manfaat terbesar. Dengan teori dapat dilihat alasan mengapa Australia melaksanakan AUKUS saat ANZUS masih aktif dan berfungsi.

1.7 Argumen Sementara

Warga Australia memiliki pendapat yang beragam tentang AUKUS dan ANZUS, dan perdebatan seputar pengaturan keamanan ini mencerminkan tantangan dan kompleksitas lingkungan strategis Australia yang sedang berlangsung, dengan adanya interferensi dari pemerintahan Australia atau *Commonwealth Government* yang memberikan kejelasan lebih fungsi dan tujuan AUKUS membuat ANZUS dipertanyakan fungsinya, dan disini diamati menggunakan konsep *Australian Realism* apa yang membuat pemerintahan Australia berkeputusan untuk melaksanakan AUKUS saat ANZUS masih berfungsi.

1.8 Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode korelasi, penelitian korelasional adalah jenis metode penelitian non-eksperimental di mana seorang peneliti mengukur dua variabel, memahami dan menilai hubungan statistik antara dua

variabel. Metode korelasional memberikan keseimbangan antara relevansi dan presisi, karena data tidak dikumpulkan dalam pengaturan yang terkontrol. Namun, data yang dikumpulkan menggunakan teknik informal, membawa relevansi hubungan dengan pengalaman kehidupan nyata. Ada dua variabel atau subjek penelitian yaitu antara pemerintahan Australia dan negara-negara Asia Pasifik dengan level subjek penelitian makro, dan objek penelitiannya adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Australia.

1.9 Sistematika Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini akan disistematikai menjadi empat bab yang saling berkaitan satu sama lain. Pada penelitian ini peneliti menggunakan sistematika pembahasan, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN Bab pertama dari proposal penelitian ini memberikan penjelasan mengenai latar belakang topik penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka yang digunakan, serta sistematika penelitian yang akan dilakukan.

BAB II Bab kedua membahas mengenai konsep *Forward Defence* yang telah memunculkan AUKUS dan ANZUS sebagai pakta pertahanan utama Australia dalam bidang militer di kawasan Indo-Pasifik, dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan keduanya melalui kerja sama yang terjalin.

BAB III Bab ketiga membahas analisis mengenai pentingnya kerja sama Australia di kawasan Indo-Pasifik melalui AUKUS dan ANZUS dengan menggunakan teori *Australian Realism* sebagai landasan. Kerja sama ini sebagai

gabungan kekuatan antara Australia, Amerika Serikat, Inggris, dan Selandia Baru dalam menjaga keamanan di kawasan tersebut.

BAB IV Bab terakhir dari proposal penelitian ini akan memberikan kesimpulan dan rekomendasi penelitian yang relevan dengan topik yang telah dijelaskan sebelumnya.

BAB II

FORWARD DEFENCE : KONTEKS KEAMANAN INTERNASIONAL

AUSTRALIA

Pada bab ini menjelaskan tentang proses *Forward Defence* dalam konteks keamanan internasional Australia, dalam proses ini ada dua variabel di dalamnya. Dari masing-masing variabel yang dicantumkan melihat bagaimana bentuk setiap kerja sama Australia dan Amerika Serikat untuk menyeimbangkan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik, dalam menghadapi kekuatan ancaman luar dengan cara menjauhkan ancaman dari kawasan. Melihat peran pakta pertahanan AUKUS dan ANZUS yang kini sedang berjalan dan menimbulkan keraguan di kawasan Indo-Pasifik, analisis ini menjelaskan tentang peran kebijakan ini di Australia sebagai upaya Australia memberikan penyeimbangan keamanan di kawasan. Bab ini juga membahas peran penting dari pakta pertahanan AUKUS dan ANZUS dalam mencapai tujuan tersebut, serta bagaimana kebijakan ini menjadi penting bagi Australia dalam memberikan penyeimbangan keamanan di kawasan. Dalam konteks tersebut, *Forward Defence Strategy* yang dilakukan oleh Australia merupakan bentuk pengaplikasian strategi dalam menjaga stabilitas negaranya, serta membendung upaya ancaman kawasan di Kawasan Indo-Pasifik dalam keamanan regional di kawasan. Analisis ini mengupas secara detail tentang peran penting *Forward Defence Strategy* dalam kebijakan keamanan Australia dan bagaimana hal ini dapat membantu menjaga stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Dalam konteks *Forward Defence* dan kebijakan pertahanan Australia, penting untuk mencatat bahwa pada tahun 2016, Pemerintah Australia merilis *Defence White Paper* pertahanan yang baru.

2.1 Australian Forward Defence

Forward Defence adalah sebuah doktrin strategi keamanan yang dipraktikkan oleh Australia selama beberapa dekade, khususnya pada periode Perang Dingin. Doktrin ini didasarkan pada ide bahwa negara-negara seperti Australia harus mempertahankan keamanan mereka dengan mengambil inisiatif untuk menghadapi ancaman keamanan di luar wilayah kawasan mereka.

Strategi ini merupakan keamanan yang tepat untuk Australia, terutama mengingat ancaman yang semakin kompleks dan beragam yang dihadapi oleh Australia dan Australia harus memiliki strategi keamanan yang proaktif dan defensif, serta memiliki kemampuan untuk menangani ancaman di luar wilayah (Davis, 2019).

Dalam praktiknya, kebijakan ini melibatkan Australia dalam kerja sama keamanan regional, seperti dengan membentuk aliansi dengan negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris, serta melakukan operasi militer dan intelijen di luar wilayah Australia. Tujuannya adalah untuk mengurangi ancaman keamanan jauh sebelum mereka mencapai wilayah Australia.

Forward Defence tidak lagi menjadi doktrin strategi resmi Australia, Australia telah beralih ke pendekatan yang lebih defensif dan bekerja sama dengan negara-negara di wilayahnya pada tahun 1975 hingga 1997, yang dikenal sebagai *Defence of Australia*. Ini mencakup fokus pada memperkuat pertahanan domestik Australia dan bekerja sama dengan negara-negara tetangga dalam hal keamanan dan stabilitas regional. Namun, beberapa prinsip *Forward Defence* masih dipertahankan dan digunakan dalam strategi keamanan Australia saat ini (Brown, 2020).

2.1.1 Hubungan Australia dengan Amerika, Selandia Baru dan Inggris terhadap *Forward Defence*

Kebijakan pertahanan yang diterapkan oleh pemerintah Australia pada tahun 1950-an dan 1960-an, di mana Australia akan berpartisipasi dalam pertahanan global melalui kontribusi aktif dalam operasi militer di luar negeri, terutama dengan bekerja sama dengan Amerika Serikat dan Inggris memiliki sejarah dan ikatan yang cukup kuat. Kebijakan ini dilakukan karena kekhawatiran atas ancaman komunis yang semakin meningkat di Asia Tenggara.

Sejarah hubungan Australia dengan Amerika dimulai pada Perang Dunia II, ketika Australia menjadi sekutu penting Amerika Serikat dalam menghadapi pasukan Jepang di Pasifik. Setelah perang, hubungan antara kedua negara semakin erat, terutama melalui Perjanjian Pertahanan Australia-Amerika Serikat pada tahun 1951, yang mengikat kedua negara untuk saling membantu dalam pertahanan dan keamanan. Kebijakan *Forward Defence* menjadi bentuk konkrit dari hubungan ini, di mana Australia berpartisipasi dalam operasi militer global yang dipimpin oleh Amerika Serikat, termasuk perang Vietnam.

Sementara itu, hubungan Australia dengan Inggris juga memiliki sejarah yang panjang, terutama karena Australia dulunya merupakan koloni Inggris. Setelah kemerdekaannya pada tahun 1901, Australia tetap menjalin hubungan erat dengan Inggris, terutama dalam hal keamanan dan pertahanan. Hal ini terlihat dalam partisipasi Australia dalam Perang Dunia I dan II sebagai bagian dari pasukan sekutu Inggris. Namun, setelah Perang Dunia II, hubungan Australia dengan Inggris mulai menurun, sementara hubungan dengan Amerika Serikat semakin erat.

Hubungan Australia dengan Selandia Baru juga memiliki sejarah yang panjang, terutama karena kedua negara memiliki banyak kesamaan dalam hal budaya, sejarah, dan politik. Namun, hubungan kedua negara sempat tegang pada tahun 1980-an, ketika Selandia Baru mengambil keputusan untuk melarang kapal-kapal nuklir Amerika Serikat masuk ke perairannya, yang membuat Australia menjadi khawatir akan keamanan wilayahnya. Namun, hubungan kedua negara kembali membaik pada tahun 1990-an dan tetap erat hingga saat ini.

2.1.2 Konteks *Forward Defence* Dalam ANZUS dan AUKUS

Kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hubungan Australia dengan dua aliansi keamanan: ANZUS dan AUKUS. ANZUS (Australia, New Zealand, United States Security Treaty): *Forward Defence* mempunyai peran penting dalam pembentukan ANZUS pada tahun 1951. Aliansi ini dibentuk sebagai respon terhadap ancaman komunis di kawasan Pasifik Selatan selama Perang Dingin, dan Australia berperan sebagai anggota aktif dalam melaksanakan strategi ini. Namun, setelah perubahan pendekatan strategis Australia menjadi *Defence of Australia* pada tahun 1975, fokus ANZUS menjadi lebih berorientasi pada pertahanan kolektif dan keamanan regional.

AUKUS (Australia, United Kingdom, United States): *Forward Defence* juga memiliki pengaruh pada pembentukan AUKUS pada tahun 2021. Perjanjian ini adalah kerja sama dalam bidang keamanan yang bertujuan untuk menghadapi ancaman keamanan baru, seperti pengembangan senjata nuklir oleh negara-negara seperti Tiongkok. Meskipun AUKUS bukan aliansi militer formal, itu

menunjukkan keterlibatan Australia yang kuat dalam kerja sama keamanan dengan negara-negara asing, terutama dengan AS dan Inggris.

2.1.3 Tantangan dari Keterlibatan ANZUS dan AUKUS dalam *Forward Defence*

Terdapat beberapa tantangan dalam kerja sama antara Australia, Amerika, Inggris, dan Selandia Baru dalam konteks ANZUS dan AUKUS. Pertama, tantangan politik dan diplomatik yang menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpercayaan dari negara-negara tetangga terhadap keputusan Australia untuk bergabung dengan AUKUS tanpa berkonsultasi dengan negara-negara tetangga seperti Indonesia dan Malaysia. Kedua, tantangan teknis dan industri yang muncul dalam implementasi ANZUS dan AUKUS. Kerja sama teknologi pertahanan yang terlibat dalam AUKUS akan membutuhkan investasi besar dan pembangunan infrastruktur yang rumit. Ketiga, tantangan dalam menjaga keseimbangan regional dan global. Kehadiran AUKUS yang baru diharapkan dapat meningkatkan keamanan regional dan global, namun juga menimbulkan kekhawatiran dari negara-negara lain yang tidak terlibat dalam aliansi ini.

Keterlibatan ANZUS dan AUKUS dalam *Forward Defence* memiliki tantangan yang perlu dipertimbangkan. Tantangan dari Keterlibatan ANZUS dalam kebijakan ini salah satunya adalah ketergantungan terhadap Amerika Serikat, keterlibatan ANZUS dan AUKUS dalam kebijakan ini membuat Australia bergantung pada Amerika Serikat untuk keamanan. Jika Amerika Serikat tidak dapat atau tidak mau membantu dalam situasi tertentu, Australia mungkin kesulitan untuk mempertahankan keamanan wilayah mereka. Kedua, konflik dengan negara lain, keterlibatan ANZUS dan AUKUS dalam *Forward Defence*

dapat memicu konflik dengan negara-negara lain, negara-negara ini mungkin melihat strategi ini sebagai ancaman, dan dapat mengambil tindakan yang merugikan keamanan ANZUS dan AUKUS. Ketiga adalah biaya, keterlibatan kedua pakta ini dalam *Forward Defence* sangatlah mahal. ANZUS harus menginvestasikan banyak uang untuk meningkatkan pertahanan dan melatih personel militer mereka, dan AUKUS dengan kapal selamnya, dan ini dapat membebani anggaran negara dan mengurangi dana yang tersedia untuk program-program lain. Negara-negara anggota perlu mempertimbangkan faktor-faktor ini saat memutuskan apakah akan terus melaksanakan strategi *Forward Defence*.

2.1.4 Implementasi Strategi *Forward Defence* 2013 - 2022

Strategi *Forward Defence* berfokus pada pengembangan kekuatan pertahanan yang mampu menanggapi ancaman sebelum mencapai pantai Australia. Kunci dari strategi *Forward Defence* Australia meliputi: *Enhanced regional engagement*, Australia berupaya meningkatkan keterlibatannya dengan negara-negara tetangga, termasuk negara-negara di Asia Tenggara dan Pasifik Selatan. Ini melibatkan penguatan hubungan diplomatik dan peningkatan kerja sama militer melalui latihan militer dan pelatihan bersama; *Capability development*, *Australian Defence Force* (ADF) meningkatkan kemampuannya menanggapi tantangan keamanan regional. Ini termasuk memperoleh kapal angkatan laut baru, pesawat tempur, dan kemampuan pengawasan; *Strategic infrastructure development*, Australia memperbarui infrastruktur strategis, seperti pelabuhan dan lapangan udara, untuk mendukung operasi militernya dan

meningkatkan kemampuannya untuk merespons krisis regional; *Intelligence sharing*, Australia bekerja untuk meningkatkan pembagian intelijen dengan mitra regionalnya untuk mengantisipasi dan menangani ancaman keamanan dengan lebih baik; *Cybersecurity*, Pemerintah Australia berinvestasi dalam kemampuan keamanan cyber untuk melindungi dari ancaman cyber.

Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah Australia di tahun 2013 - 2022 dalam mengimplementasikan strategi ini antara lain: Pemerintah Australia telah mengalokasikan sekitar AUD 270 miliar dalam kurun waktu 10 tahun untuk meningkatkan kemampuan pertahanan nasional. Dalam anggaran tersebut, sebagian besar diperuntukkan untuk pengadaan teknologi militer dan modernisasi peralatan pertahanan, termasuk drone dan pesawat tempur; Penguatan kerja sama dengan negara-negara sekutu, pemerintah Australia terus memperkuat kerja sama pertahanan dengan negara-negara sekutu seperti Amerika Serikat, Jepang, dan India melalui latihan militer bersama dan pertukaran intelijen; Peningkatan militer di kawasan Indo-Pasifik, pemerintah Australia berencana untuk menempatkan lebih banyak pasukan di kawasan Indo-Pasifik untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan memperkuat keamanan regional. Peningkatan kehadiran militer ini meliputi kerja sama dengan negara-negara tetangga Australia, seperti Indonesia dan Papua Nugini; Peningkatan kemampuan pertahanan *cyber*, pemerintah Australia juga berfokus pada pengembangan kemampuan *cyber security* untuk melindungi infrastruktur kritis, seperti jaringan komunikasi dan sistem keuangan, dari serangan *cyber* (Department of Defence, 2021).

Sebagai sebuah strategi pertahanan, *Forward Defence* merupakan langkah yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencegah ancaman yang berasal dari luar negaranya. Australia sendiri telah mengadopsi strategi ini sejak lama, dan pada tahun 2021, mereka kembali mengimplementasikannya dengan tujuan untuk mempertahankan keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Salah satu implementasi strategi *Forward Defence* yang dilakukan oleh Australia adalah dengan meningkatkan kerja sama pertahanan dengan negara-negara tetangga di kawasan Indo-Pasifik. Australia juga memperkuat hubungan militer dengan sekutunya lamanya, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Selandia Baru. Selain itu, Australia juga meningkatkan kemampuan pertahanan maritimnya dengan membeli kapal perang, pesawat tempur, dan peralatan militer lainnya. Hal ini dilakukan untuk memperkuat kemampuan pertahanan Australia dalam menghadapi ancaman di kawasan Indo-Pasifik. Dengan fokus pada pengembangan kapabilitas militer, terutama dalam bidang teknologi dan kemampuan pertahanan diri, Australia melalui AUKUS dapat menggandeng Amerika Serikat dan Inggris untuk memperkuat kerja sama militer di kawasan tersebut. Sementara ANZUS yang melibatkan Australia, Amerika Serikat, dan Selandia Baru juga dapat memperkuat kerja sama dalam hal pertahanan dan keamanan regional. Sehingga, implementasi strategi *Forward Defence* pada tahun 2022 dapat mendukung peran AUKUS dan ANZUS dalam mempertahankan keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Implementasi strategi *Forward Defence* oleh Australia menunjukkan komitmen Australia dalam mempertahankan keamanan di kawasan Indo-Pasifik sehingga Australia siap menghadapi ancaman yang mungkin terjadi di masa depan.

2.2 Australian Defence White Paper

Defence White Paper adalah dokumen strategis komprehensif yang menjelaskan tantangan keamanan nasional Australia dan peran angkatan pertahanannya dalam mengatasi tantangan tersebut. Dokumen ini diperbarui setiap beberapa tahun untuk mencerminkan kondisi keamanan yang berubah dan prioritas pertahanan yang berkembang.

Australian Defence White Paper terbaru dirilis pada tahun 2016 untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara. Dokumen ini menekankan pentingnya hubungan Australia dengan sekutunya, terutama Amerika Serikat, dan menyoroti perlunya investasi yang lebih besar dalam kemampuan pertahanan untuk mengatasi ancaman yang semakin meningkat di wilayah kawasan Asia-Pasifik. Beberapa prioritas utama yang diidentifikasi dalam dokumen ini antara lain: Meningkatkan kemampuan maritim Australia, termasuk akuisisi kapal selam baru, kapal perang fregat, dan kapal patroli; Meningkatkan kemampuan *cybersecurity* negara untuk mempertahankan diri dari serangan *cyber*; Berinvestasi dalam teknologi militer canggih, seperti *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV), untuk meningkatkan kemampuan intelijen, pengawasan, dan pengintaian Australia; Mengembangkan industri pertahanan yang lebih kuat untuk mendukung kebutuhan pertahanan negara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi; Meningkatkan kemitraan pertahanan regional Australia dan bekerja sama dengan negara lain di kawasan Asia-Pasifik untuk mempromosikan stabilitas dan keamanan regional.

2.2.1 *Defence White Paper memandang Tiongkok*

Bagian tentang Tiongkok diakui pentingnya Tiongkok sebagai mitra dagang bagi Australia, namun juga menyoroti tantangan strategis yang dihadapi Australia sebagai akibat dari kebangkitan Tiongkok terhadap keamanan Australia. Beberapa poin penting dari bagian tentang Tiongkok meliputi: Kebangkitan Tiongkok mengubah keseimbangan kekuatan di wilayah Indo-Pasifik, dan hal ini berdampak pada keamanan Australia; Australia mencari hubungan yang konstruktif dengan Tiongkok, tetapi juga mempertahankan kepentingan nasional dan menjaga tata aturan internasional; *Defence White Paper* menyoroti perlunya ADF yang kredibel dan tangguh untuk menakut-nakuti musuh potensial dan merespons ancaman keamanan, termasuk yang ditimbulkan oleh modernisasi militer Tiongkok; *Defence White Paper* mengidentifikasi beberapa area dalam hubungan Australia-Tiongkok, termasuk sengketa klaim wilayah dan masalah hak asasi manusia; *Defence White Paper* juga mencatat pentingnya aliansi Australia dengan Amerika Serikat, Jepang, dan mitra regional lainnya dalam mengelola tantangan strategis yang ditimbulkan oleh kebangkitan Tiongkok. *2016 Defence White Paper* mencerminkan pengakuan pemerintah Australia akan implikasi strategis dari kebangkitan Tiongkok, dan komitmennya terhadap ADF yang kuat dan mampu untuk mempertahankan kepentingan Australia di wilayah tersebut.

2.2.2 *Defence White Paper memandang Amerika Serikat*

2016 Defence White Paper menegaskan bahwa hubungan pertahanan dan keamanan Australia-Amerika Serikat merupakan salah satu pilar penting dari kebijakan pertahanan Australia. Dokumen tersebut menekankan bahwa Australia

akan terus memperkuat hubungan pertahanan dan keamanan dengan Amerika Serikat melalui berbagai cara, termasuk meningkatkan kerja sama militer dan mengembangkan kapasitas pertahanan bersama. Selain itu, *2016 Defence White Paper* juga mencatat bahwa Amerika Serikat merupakan kekuatan pertahanan global yang penting dan bahwa kehadiran Amerika Serikat di kawasan Asia-Pasifik sangat penting untuk keamanan dan stabilitas regional. Dokumen tersebut menegaskan bahwa Australia akan terus mendukung kehadiran Amerika Serikat di kawasan tersebut dan akan bekerja sama dengan Amerika Serikat dan negara-negara lain dalam memperkuat keamanan dan stabilitas regional. Bagian Amerika Serikat dalam *2016 Defence White Paper* menegaskan bahwa hubungan Australia-Amerika Serikat dalam bidang pertahanan dan keamanan sangat penting bagi keamanan dan stabilitas di kawasan Asia-Pasifik dan bahwa Australia akan terus memperkuat hubungan tersebut.

2.2.3 *Defence White Paper memandang Inggris*

2016 Defence White Paper mencakup bagian tentang Inggris yang menyoroti hubungan pertahanan dan keamanan yang kuat antara Australia dan Inggris. Dalam bagian tersebut, Inggris diakui sebagai salah satu mitra pertahanan terdekat Australia dengan sejarah kerja sama dan kolaborasi yang mendalam dalam banyak konflik. Dokumen tersebut juga menekankan peran penting Inggris dalam urusan keamanan global dan pentingnya kerja sama dan koordinasi yang terus-menerus antara Australia dan Inggris dalam berbagai bidang, seperti berbagi intelijen, kontra terorisme, dan keamanan maritim. Latihan militer dan program pelatihan bersama juga dianggap penting dalam memperkuat kemitraan antara

kedua negara. *2016 Defence White Paper* menegaskan bahwa kemitraan Australia-Inggris sangat penting dalam memajukan kepentingan bersama dalam bidang pertahanan dan keamanan serta menjaga perdamaian dan stabilitas internasional.

2.2.4 Defence White Paper memandang Selandia Baru

2016 Defence White Paper juga mencakup bagian tentang Selandia Baru, mengakui bahwa Selandia Baru merupakan mitra pertahanan yang penting bagi Australia dalam mempertahankan stabilitas dan keamanan di kawasan Pasifik Selatan. Dalam bagian tersebut, dipertegas bahwa Selandia Baru dan Australia berbagi banyak kepentingan dalam menjaga perdamaian dan stabilitas regional. Kerja sama dan kolaborasi dalam hal keamanan dan pertahanan sangat penting, termasuk dalam upaya melawan terorisme, penyebaran senjata nuklir, dan ancaman keamanan lainnya. Selain itu, *2016 Defence White Paper* juga menyoroti pentingnya kerja sama antara militer Australia dan Selandia Baru, termasuk melalui latihan bersama dan program pertukaran personil militer. Kedua negara juga sepakat untuk meningkatkan kerja sama dalam hal pertahanan maritim dan memperkuat kapasitas pertahanan Selandia Baru.

2.3 Dampak Defence White Paper terhadap Forward Defence di Australia

Dokumen kebijakan pertahanan utama pemerintah Australia yang dikeluarkan secara periodik ini memaparkan rencana strategis jangka panjang untuk pertahanan nasional dan keamanan Australia, termasuk prioritas investasi dalam kekuatan pertahanan dan arah kebijakan pertahanan nasional. Salah satu

dampak *Defence White Paper* terhadap *Forward Defence* di Australia adalah adanya penekanan yang lebih besar pada pertahanan di wilayah Australia dan wilayah sekitarnya. Dokumen ini mengakui bahwa ancaman terhadap keamanan Australia semakin kompleks dan meluas, dan oleh karena itu memerlukan fokus yang lebih besar pada pertahanan wilayah Australia dan kawasan sekitarnya, seperti Pasifik Selatan dan Timur.

Dokumen ini juga menekankan pentingnya kerja sama dengan negara-negara yang memiliki kepentingan strategis serupa, seperti Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Pasifik lainnya. Ada penekanan yang lebih besar pada kerja sama yang seimbang dan saling menguntungkan, sehingga Australia tidak sepenuhnya bergantung pada negara lain dalam hal pertahanan nasional. Dampak lain dari *Defence White Paper* terhadap adalah penekanan pada investasi dalam teknologi pertahanan dan kemampuan pertahanan canggih yang mampu melindungi Australia dari ancaman yang semakin kompleks dan meluas. Dokumen ini juga menekankan pentingnya rekrutmen dan pengembangan personil pertahanan yang berkualitas tinggi, serta peningkatan dalam komunikasi dan koordinasi berbagai pihak yang terlibat dalam pertahanan nasional.

Dengan demikian, *Defence White Paper* telah mengubah beberapa aspek dari *Forward Defence* di Australia, dengan menempatkan lebih banyak fokus pada pertahanan wilayah Australia dan kawasan sekitarnya, kerja sama yang seimbang dan saling menguntungkan, investasi dalam teknologi pertahanan dan kemampuan pertahanan canggih, dan pengembangan pertahanan yang berkualitas tinggi (Davis, 2019).

2.4 Keterlibatan Defence White Paper dalam keamanan Australia

Rencana yang ambisius yang diusulkan dalam *2016 Defence White Paper* akan memerlukan waktu yang sangat lama untuk mencapai tujuan, sementara lingkungan strategis di Australia semakin memburuk, ada dua kesimpulan. Pertama, *Capability Development* saat ini yang direncanakan dalam *2016 Defence White Paper* tidak dirancang untuk menghadapi ancaman yang muncul secara tiba-tiba, melainkan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan struktur kekuatan ADF. Namun pada saat yang sama, struktur kekuatan yang diusulkan meniru pola masa lalu tanpa mempertimbangkan seberapa cepat perang dan teknologi, banyak di antaranya bukan bersifat militer tetapi memiliki mengikuti sifat kemiliteran. *Maginot Line* laut udara Australia dapat dielakkan dengan cepat baik dalam pertempuran maupun dalam pengembangan militer-teknologi. Kondisi ini mendorong kesimpulan kedua, yaitu bahwa pengeluaran pertahanan perlu beralih dengan cepat untuk mengakuisisi kemampuan baru dan melakukan diplomasi pertahanan yang lebih efektif dengan tetangga dan seluruh wilayah untuk memungkinkan Australia memanfaatkan strategi militer baru. Hal ini akan menuntut prioritasasi pengadaan pertahanan, dengan memberikan kepentingan yang lebih besar pada pengakuisisian proyeksi daya jarak jauh untuk pasukan udara dan angkatan laut dan pengelolaan pertahanan yang lebih efektif (Davis, 2019).

BAB III

AUSTRALIAN REALISM

Pada Bab ini menjelaskan proses *Australian Realism*, Teori ini adalah kerangka teoritis yang digunakan untuk menjelaskan perilaku sosial, terutama dalam bidang ekonomi dan ilmu politik. Premis dasar dari teori ini adalah bahwa negara harus mencerminkan kehidupan sehari-hari dan realitas sosial yang ada di Australia. Oleh karena itu, para penulis *Australian Realism* menyebutkan bahwa teori ini memiliki tiga variabel yaitu *Prudence*, *Powerlessness*, dan *Avoidance*. Dari masing-masing variabel yang dicantumkan melihat bagaimana bentuk setiap kerja sama Australia dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Selandia Baru untuk menyeimbangkan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik, dalam menjaga hubungan baik dengan negara-negara kawasan. Dalam proses ini hubungan keamanan pertahanan militer menjadi proses pengambilan strategi Australia dalam menjaga posisinya. *Forward Defence* sendiri sebuah strategi yang diambil oleh negara *powerful* dalam menentukan posisinya. Seperti Pemerintah Australia terus berkontribusi secara diplomatis dan strategis dalam upayanya menciptakan lingkungan yang strategis melihat stabilitas dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik yang tentunya menjadi fokus utama dari isi *Australia Defence White Paper*. Pembuatan pangkalan militer sebagai langkah Australia dalam menjaga hubungannya dengan Amerika Serikat. Serta peran aliansi sebagai proses komunikasi secara multilateral serta kesimpulan dalam proses *Forward Defence Strategy*.

3.1 Posisi Australian Realism dalam Classical Realism

Classical realism atau realisme pada umumnya menekankan perjuangan untuk kekuasaan dan keamanan antara negara-negara yang didorong oleh kepentingan sendiri dan pengejaran kekuasaan. Di sisi lain, *Australian Realism* menekankan pentingnya norma, nilai, hukum internasional, lembaga, dan peran pelaku non-negara dalam hubungan internasional. Meskipun terdapat perbedaan antara keduanya, *Australian Realism* dapat ditempatkan sebagai bagian dari realisme karena masih menekankan pentingnya kekuasaan dan keamanan dalam hubungan internasional, namun dengan menambahkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi hubungan internasional seperti norma, nilai, dan lembaga. Menurut *classical realism*, negara-negara adalah pelaku kunci dalam hubungan internasional dan sistem internasional ditandai dengan anarki, yang berarti tidak ada otoritas yang lebih tinggi untuk menegakkan aturan atau menyelesaikan sengketa antara negara-negara. *Australian Realism*, di sisi lain, adalah teori pemikiran yang baru dalam hubungan internasional yang muncul pada tahun 1980-an dan 1990-an. Teori ini sering dikaitkan dengan karya ilmiah seperti Hedley Bull, yang berpendapat bahwa hubungan internasional tidak hanya tentang kekuasaan dan keamanan, tetapi juga tentang norma dan nilai. Australian Realism menekankan pentingnya hukum internasional dan lembaga, serta peran pelaku non-negara seperti perusahaan multinasional dan organisasi internasional (Maione, 2008).

Perbedaan utama lain antara *classical realism* dan *Australian Realism* adalah pendekatan mereka terhadap konsep *sovereignty* atau kedaulatan. *Classical realism* menekankan pentingnya kedaulatan negara, sedangkan *Australian*

Realism mengakui pentingnya pelaku non-negara dan hukum internasional serta lembaga dalam membentuk hubungan internasional. *Australian Realism* berpendapat bahwa kedaulatan tidaklah mutlak dan harus tunduk pada batasan tertentu, seperti menghormati hak asasi manusia dan hukum internasional. Secara keseluruhan, meskipun kedua aliran ini memperhatikan kekuasaan, keamanan, dan perilaku negara dalam hubungan internasional, *Australian Realism* menekankan pentingnya norma, nilai, dan lembaga dalam membentuk hubungan internasional, sementara *classical realism* lebih fokus pada pengejaran kekuasaan dan sifat anarkis sistem internasional.

Eksistensi *Australian Realism* secara tidak langsung merupakan hasil dari *neoclassical realism* yang dimana merupakan pengembangan dari *neorealism*, yang menjelaskan peran sistem internasional dan juga cakupan analisis untuk mencakup faktor-faktor domestik dan pengambilan keputusan individu, teori *neoclassical realism* menekankan pentingnya faktor domestik dalam membentuk kebijakan luar negeri suatu negara. Menurut teori ini, meskipun sistem internasional dan faktor eksternal memainkan peran penting, kondisi politik, ekonomi, dan sosial domestik yang menentukan perilaku suatu negara dalam ranah internasional.

Dalam pembentukan *Australian Realism*, penerapan *neoclassical realism* pada kebijakan luar negerinya dapat memberikan gambaran tentang beberapa faktor domestik yang telah membentuk perilaku Australia dalam sistem internasional. Pertama, sejarah kolonialisme dan lokasi geografis negara telah menjadi faktor penting dalam membentuk kebijakan luar negeri Australia. Sebagai bekas koloni Inggris, Australia telah menjaga hubungan yang kuat dengan Inggris

dan Amerika Serikat, yang telah mempengaruhi keputusan kebijakan luar negerinya, terutama dalam hal keamanan dan pertahanan. Kedua, politik dan institusi domestik juga menjadi faktor penting dalam membentuk kebijakan luar negeri Australia. Sistem pemerintahan parlementer negara ini telah memungkinkan munculnya pemimpin populistik yang mengambil pendekatan nasionalis dan isolasionis terhadap kebijakan luar negeri, sambil juga mempromosikan hubungan yang lebih kuat dengan sekutu tradisional seperti AS.

Ketiga, faktor ekonomi juga memainkan peran dalam membentuk kebijakan luar negeri Australia. Sebagai negara kaya sumber daya, Australia sangat bergantung pada ekspor mineral dan produk pertanian, yang telah menuntun pada fokus pada liberalisasi perdagangan dan pengejaran perjanjian perdagangan bebas dengan negara lain. Penerapan *neoclassical realism* pada kebijakan luar negeri Australia menekankan pentingnya faktor domestik seperti sejarah, geografi, politik, institusi, dan ekonomi dalam membentuk perilaku negara tersebut dalam sistem internasional. Dengan memahami faktor-faktor ini, dapat disimpulkan bagaimana pembentukan *Australian Realism* dari *neoclassical realism* di Australia, dan ini membuat para pembuat kebijakan dapat mengembangkan kebijakan luar negeri yang lebih sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan negara, sambil juga mempertimbangkan konteks internasional yang lebih luas (McLean, 2015) (Boehmer, 2010).

3.2 Prudence

Prudence merupakan tema yang umum ditemukan dalam *Australian Realism*. *Prudence* menunjukkan komitmen untuk menampilkan realisme dan

fokus pada sikap berhati-hati sebagai hal yang diperlukan untuk bertahan di lingkungan Australia. *Prudence* juga dianggap sebagai salah satu upaya Australia untuk memperkuat kekuatannya di kawasan Asia. Dalam *2016 Defence White Paper*, pernyataan diberikan bahwa pertahanan Australia memainkan peran penting dalam membentuk kemitraan yang lebih kuat dan mengembangkan industri pertahanan dalam rangka membangun inovasi teknologi baru yang akan menguntungkan Australia di masa depan. Hal ini juga menjadi tujuan pembuatan pakta pertahanan yang bertujuan untuk memberikan inovasi baru dalam transfer ilmu pengetahuan dan memberikan dukungan dalam memperkuat kekuatan regional bagi anggota. Dalam konteks ini, *Prudence* sangat membantu Australia untuk meningkatkan kapabilitasnya dalam menangani kekuatan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Dalam konteks hubungan Australia dengan Amerika Serikat, *Prudence* sangat penting untuk menjaga kemitraan strategis mereka. Australia selalu menganggap Amerika Serikat sebagai sekutu penting dalam hal keamanan, dan kemitraan antara kedua negara tersebut telah terjalin sejak lama. Namun, dengan meningkatnya kekuatan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik, kemitraan tersebut semakin penting bagi Australia. Dalam hal ini, *Prudence* memungkinkan Australia untuk menjaga kemitraannya dengan Amerika Serikat dengan mempertimbangkan kepentingan nasionalnya, serta dengan memastikan bahwa kedua negara dapat bekerja sama secara efektif dalam menangani ancaman di kawasan tersebut.

Dalam konteks hubungan Australia dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik, *Prudence* juga memungkinkan Australia untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam membantu negara-negara tersebut untuk mengatasi

tantangan keamanan yang dihadapi. Berikut aplikasi aspek *Prudence* di beberapa negara-negara kawasan:

Tabel 1 Aplikasi variabel Prudence dalam Australian Realism

Negara-negara yang bekerja sama	Aplikasi <i>Prudence</i>
Indonesia	IAFCP Program (<i>Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership</i>) Kerja sama antara Indonesia dan Australia dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca melalui pengelolaan hutan. Program ini membantu Indonesia dalam mengembangkan kebijakan dan program pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim.
Filipina	<i>Australia-Philippines Comprehensive Partnership</i> Australia-Philippines Comprehensive Partnership adalah kerja sama antara Australia dan Filipina yang meliputi berbagai bidang, seperti keamanan, perdagangan, investasi, pendidikan, dan kesehatan.
Thailand	<i>Australia-Thailand Strategic Dialogue</i> 1. Forum untuk membahas isu-isu strategis di antara kedua negara, seperti keamanan, politik, ekonomi, dan perdagangan. <i>Australia-Thailand Joint Research Scheme</i> 2. Program kerja sama dalam penelitian dan pengembangan teknologi <i>Thailand-Australia Free Trade Agreement (TAFTA)</i> 3. Perjanjian perdagangan bebas antara Thailand dan Australia.
Brunei	<i>Comprehensive Partnership and Cooperation Agreement</i> Kerja sama di berbagai bidang, seperti perdagangan, investasi, pendidikan, dan keamanan. Tujuannya adalah untuk memperkuat hubungan bilateral dan meningkatkan kesejahteraan kedua negara.
Vietnam	<i>Australia-VietNam Comprehensive Partnership</i> Kerja sama antara Australia dan Vietnam dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, keamanan, dan kebudayaan. Tujuannya adalah untuk memperkuat hubungan bilateral dan memperdalam kerja sama di berbagai bidang.
Kamboja	<i>Australian Volunteers Program</i> Program yang memfasilitasi sukarelawan Australia untuk membantu dalam pembangunan dan kesejahteraan sosial di Kamboja. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara Australia dan Kamboja.
Laos	<i>Australia-Laos Human Resource Development Partnership</i> Kerja sama antara Australia dan Laos dalam bidang sumber daya manusia, khususnya dalam pendidikan dan pelatihan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di Laos.
Myanmar	<i>English Language Training for Myanmar Government Officials</i> Program pelatihan bahasa Inggris untuk pejabat pemerintah Myanmar. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris para pejabat pemerintah sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam kerja sama regional dan internasional.

sumber: (Foreign Policy White Paper, 2017) (Department of Foreign Affairs and Trade).

Sebagai salah satu negara maju di kawasan tersebut, Australia memiliki kemampuan untuk memberikan bantuan keamanan dan ekonomi kepada negara-negara yang membutuhkan. Hal ini juga dapat membantu Australia dalam membangun hubungan yang lebih baik dengan negara-negara tersebut, serta memperkuat posisinya di kawasan Indo-Pasifik. Dalam kesimpulannya, *Prudence* merupakan prinsip yang sangat penting dalam *Australian Realism*. Prinsip ini memungkinkan Australia untuk memahami dan menilai situasi secara obyektif, serta untuk mengambil keputusan yang tepat dalam kebijakan luar negerinya. Dalam konteks kemitraan dengan Amerika Serikat dan hubungan dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik, *Prudence* memungkinkan Australia untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam membantu negara-negara tersebut mengatasi tantangan keamanan yang dihadapi, serta untuk memperkuat posisinya di kawasan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi Australia untuk terus menerapkan prinsip *Prudence* dalam kebijakan luar negerinya, serta dalam upayanya untuk memperkuat kekuatannya di kawasan Asia. Dalam teori *Australian Realism*, Australia berupaya mendukung beberapa negara di kawasan Indo-Pasifik dengan memberikan dana besar guna menahan pengaruh dan ancaman dari luar di kawasan tersebut. Australia berupaya meningkatkan kapabilitasnya dengan memastikan bahwa pertahanannya menggunakan kekuatan strategis seperti militer dan investasi. Australia dengan tegas meningkatkan kekuatannya di kawasan Indo-Pasifik dalam rangka mendukung kepentingan nasionalnya dan untuk menciptakan tatanan global yang berbasis aturan (Wesley, 2009).

3.3 Powerlessness

Hal yang sudah tidak asing lagi bagi Realisme Australia dibentuk oleh kekhawatiran akan *Powerlessness* dan perbedaan budaya sebagaimana halnya Realisme Amerika dibentuk oleh kekhawatiran akan kekuatan. *Powerlessness* merujuk pada posisi negara Australia sebagai negara kecil yang rentan terhadap ancaman dari negara-negara besar seperti Tiongkok. Meskipun Australia memiliki kekuatan relatif yang signifikan di kawasan, namun kekuatan ini masih jauh dibawah kekuatan Tiongkok dan Amerika Serikat. Oleh karena itu, negara Australia sering merasa rentan dan terancam oleh kekuatan eksternal, dan harus berjuang untuk mempertahankan posisinya dalam lingkungan keamanan yang semakin tidak stabil. (Wesley, 2009)

Sebagai negara *middle power*, Australia memiliki sedikit daya tawar dalam menghadapi negara-negara besar seperti Tiongkok dan Amerika Serikat. Oleh karena itu, negara ini cenderung bergantung pada kerja sama dengan negara-negara lain, seperti negara-negara Eropa dan Jepang, untuk mempertahankan kepentingannya di kawasan. Namun demikian, negara ini juga mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan kekuatan militernya dan menunjukkan bahwa negara tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan oleh kekuatan asing.

3.3.1 *Populate or Perish*

Slogan yang diciptakan oleh Menteri Imigrasi Australia, Arthur Calwell, pada tahun 1947 ini mendorong orang untuk mempercepat pertumbuhan populasi di Australia, terutama melalui imigrasi, untuk memperkuat keamanan dan

pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Slogan ini dianggap sebagai respon terhadap kekhawatiran tentang ancaman militer dari Jepang selama Perang Dunia ke-2, serta kekhawatiran tentang keberlanjutan ekonomi Australia. Pemerintah Australia melihat peningkatan populasi sebagai cara untuk mengurangi ketergantungan ekonomi pada ekspor sumber daya alam, dan memperkuat pasar domestik. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah Australia menawarkan program migrasi besar-besaran, yang memberikan kesempatan bagi jutaan orang dari seluruh dunia untuk pindah ke Australia dan memulai kehidupan baru di negara tersebut. Program ini berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan populasi Australia dalam beberapa dekade terakhir, meskipun program ini juga menuai kritik atas isu-isu imigrasi dan pengungsi. Secara keseluruhan, slogan "*Populate or Perish*" mencerminkan kesadaran pemerintah Australia akan pentingnya populasi dalam mengamankan masa depan negara, dan menunjukkan komitmen untuk mempercepat pertumbuhan populasi melalui imigrasi (Van der Eecken, 2019).

Slogan ini secara tidak langsung terkait dengan *Australian Realism*. Namun, beberapa ilmuwan telah berargumen bahwa slogan tersebut mencerminkan perspektif realis terhadap kepentingan strategis Australia, karena pemerintah melihat pertumbuhan populasi sebagai sarana untuk meningkatkan kekuatan militer dan ekonomi Australia di kawasan. Dalam hal ini, "*Populate or Perish*" dapat dilihat sebagai manifestasi dari gagasan realis bahwa negara harus mengejar kekuasaan dan keamanan untuk bertahan hidup di dalam sistem internasional yang kompetitif.

3.3.2 *Kekuatan militer Australia dalam konteks Powerlessness*

Dalam hal kekuatan militer, Australia adalah salah satu negara dengan kekuatan militer yang cukup signifikan di kawasan Asia Pasifik. Menurut *Global Firepower Index* pada tahun 2021, Australia menempati peringkat ke-21 dari 140 negara dalam hal kekuatan militer. Meskipun demikian, kekuatan militer bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan kekuatan suatu negara. Ada banyak faktor lain seperti kekuatan ekonomi, diplomasi, stabilitas politik dan lainnya yang juga mempengaruhi kekuatan suatu negara dalam urusan internasional. Selain itu, Australia juga merupakan anggota penting dalam beberapa aliansi keamanan regional dan internasional, seperti ANZUS dan *Five Eyes*, yang memberikan dukungan dan akses ke sumber daya keamanan lainnya. Namun, jika Anda bertanya tentang konteks kekuatan militer dan *Powerlessness* di Australia, maka ada beberapa faktor yang dapat menjadi tantangan bagi Australia dalam mengelola keamanannya. Beberapa faktor ini termasuk kebijakan luar negeri dan keamanan yang terus berubah, ketergantungan pada teknologi asing, kebutuhan untuk mengelola ancaman keamanan non-tradisional seperti terorisme dan *cyber warfare*, serta persaingan yang semakin meningkat dengan negara-negara besar di kawasan Asia Pasifik. Dalam menghadapi tantangan ini, Australia terus meningkatkan kemampuan keamanannya dan bekerja sama dengan negara-negara lain untuk memastikan stabilitas dan keamanan di kawasan ini (Global Firepower, 2021).

3.3.3 *Ekonomi Australia dalam konteks Powerlessness*

Ekonomi Australia relatif kuat dan stabil dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik. Australia adalah anggota dari *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC), dan telah menjalin banyak perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara lain di kawasan tersebut, termasuk dengan Amerika Serikat, Cina, dan Jepang. Namun, seperti negara-negara lainnya, Australia juga menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan. Pandemi COVID-19, misalnya, telah mengganggu ekonomi global dan memiliki dampak yang signifikan pada ekonomi Australia. Kebijakan lockdown dan pembatasan perjalanan telah menghambat aktivitas ekonomi, termasuk sektor pariwisata dan layanan. Selain itu Australia juga menghadapi beberapa tantangan ekonomi struktural, seperti ketergantungan pada ekspor sumber daya alam seperti batu bara dan besi, serta tingginya biaya hidup dan kekurangan tenaga kerja. Dalam menghadapi tantangan ekonomi ini, pemerintah Australia terus berupaya untuk memperkuat ekonominya dengan mendorong investasi dalam sektor-sektor non-sumber daya dan meningkatkan akses pasar untuk produk-produknya. Australia juga berupaya untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dengan negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik, seperti dengan meningkatkan partisipasinya dalam *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC) dan memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara ASEAN.

3.3 Avoidance

Avoidance menjadi strategi penting untuk Australia menghindari konflik, sering dianggap sebagai suatu strategi yang mumpuni dan lebih efektif daripada

menggunakan kekuatan militer secara langsung. Hal ini terkait dengan konsep Australia yang secara geografis terisolasi dan memiliki kekuatan militer yang terbatas, sehingga menggunakan kekuatan militernya secara langsung cenderung lebih berisiko dan kurang efektif dalam mencapai tujuan negara. Sebaliknya, menghindari konflik dan mencari jalan keluar yang lebih damai melalui diplomasi dan negosiasi dianggap sebagai pilihan yang lebih bijaksana. Namun, ini bukan berarti bahwa Australia tidak siap untuk menggunakan kekuatan militer jika perlu, tetapi strategi ini lebih cenderung dipilih sebagai opsi terakhir. Berikut aplikasi aspek *Avoidance* di beberapa negara-negara kawasan:

Tabel 2 Aplikasi variabel Avoidance dalam Australian Realism

Negara-negara yang bekerja sama	Aplikasi <i>Avoidance</i>
Malaysia	<p><i>Malaysia-Australia Free Trade Agreement (MAFTA)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Perjanjian perdagangan bebas ini diratifikasi pada tahun 2013 dan bertujuan untuk meningkatkan perdagangan dan investasi antara kedua negara. <p><i>Joint Declaration on Comprehensive Strategic Partnership between Malaysia and Australia</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Pernyataan bersama ini diteken pada tahun 2015 dan mencakup kerja sama dalam berbagai bidang, termasuk pertahanan dan keamanan.
Singapura	<p><i>Singapore-Australia Comprehensive Strategic Partnership (CSP)</i></p> <p>CSP ini ditandatangani pada tahun 2015 dan mencakup kerja sama dalam berbagai bidang, termasuk pertahanan dan keamanan.</p>
Indonesia	<p><i>Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Perjanjian kemitraan ekonomi ini diratifikasi pada tahun 2019 dan bertujuan untuk meningkatkan perdagangan dan investasi antara kedua negara. IA-CEPA mencakup kewajiban untuk mendorong transfer teknologi dan investasi dalam industri pertahanan. <p><i>Agreement between the Government of Australia and the Government of the Republic of Indonesia concerning Cooperation in the Treatment of Prisoners</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Perjanjian ini diratifikasi pada tahun 2014 dan mengatur kerja sama dalam penanganan tahanan antara kedua negara. <p><i>Memorandum of Understanding between the Government of Australia and the Government of the Republic of Indonesia on Countering Terrorism Cooperation</i></p> <ol style="list-style-type: none"> MoU ini ditandatangani pada tahun 2015 dan mencakup kerja sama dalam bidang intelijen dan penanggulangan terorisme.

Negara-negara yang bekerja sama	Aplikasi <i>Avoidance</i>
Filipina	<i>Philippines-Australia Status of Visiting Forces Agreement (SOVFA)</i> Perjanjian ini ditandatangani pada tahun 2017 dan memungkinkan pasukan militer dari kedua negara untuk berkunjung dan melaksanakan kegiatan di wilayah masing-masing.
Vietnam	<i>Vietnam-Australia Plan of Action on Enhancing Strategic Partnership (2016-2019)</i> Rencana aksi ini mencakup kerja sama dalam bidang pertahanan, termasuk pelatihan dan latihan militer bersama. <i>Joint Declaration on the Comprehensive Partnership between the Socialist Republic of Vietnam and Australia</i> Pernyataan bersama ini diteken pada tahun 2015 dan mencakup kerja sama dalam berbagai bidang, termasuk pertahanan dan keamanan.

sumber: (Foreign Policy White Paper, 2017)(Department of Foreign Affairs and Trade).

Avoidance dapat dianggap sebagai strategi yang pragmatis dan realistis, yang memungkinkan Australia untuk memperjuangkan kepentingannya dengan cara yang aman dan efektif. Dalam menghadapi ancaman yang kompleks dan dinamis di kawasan Indo-Pasifik, Australia menggunakan strategi yang menggabungkan elemen kerja sama regional, diplomasi, dan kekuatan militer yang seimbang. Meskipun demikian, Australia tetap berkomitmen untuk mempertahankan kepentingannya dan mengambil tindakan jika diperlukan untuk melindungi keamanannya.

Strategi *Avoidance* juga memungkinkan Australia untuk memperkuat hubungan bilateral dan multilateral dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Dalam era globalisasi dan interdependensi yang semakin meningkat, hubungan diplomatik dan perdagangan yang kuat menjadi sangat penting bagi keberhasilan Australia dalam mempertahankan posisinya di kawasan. Dalam hal ini, strategi *Avoidance* dapat membantu Australia untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan negara-negara tetangganya tanpa menimbulkan ketegangan atau konflik yang merugikan kedua belah pihak. Namun, strategi *Avoidance* bukanlah solusi universal yang dapat digunakan dalam

semua situasi. Terkadang, kekuatan militer harus digunakan untuk mempertahankan keamanan negara dan melindungi kepentingannya. Oleh karena itu, Australia harus tetap mempertahankan kemampuan militernya dan memperkuat kerja sama militer dengan sekutu-sekutunya. Selain itu, Australia juga harus meningkatkan kemampuan diplomasi dan negosiasi untuk memastikan bahwa konflik dapat dihindari dan masalah dapat diselesaikan secara damai. Dalam menghadapi tantangan dan ancaman di kawasan Indo-Pasifik, Australia harus mempertimbangkan dengan cermat pilihan-pilihan strategisnya untuk mencapai tujuan negara dengan cara yang efektif dan aman.

Australian Realism menekankan pentingnya kebijaksanaan dan pertimbangan yang cermat dalam merumuskan strategi. Hal ini menunjukkan bahwa strategi harus didasarkan pada penilaian yang hati-hati terhadap tujuan yang ingin dicapai dan sarana yang tersedia untuk mencapainya. Dalam hal strategi khusus, *Australian Realism* memberi prioritas pada *Avoidance of instability* dan perlindungan kepentingan Australia di ranah internasional. Hal ini dapat melibatkan pembentukan aliansi dengan negara lain untuk menyeimbangkan ancaman yang dirasakan, seperti pengaruh Tiongkok yang semakin meningkat di wilayah Indo-Pasifik. Hal ini juga dapat melibatkan investasi dalam kemampuan pertahanan dan peningkatan kerja sama militer.

Dengan *avoidance*, pertimbangan yang cermat terhadap tujuan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut, *Australian Realism* tidak terlalu mementingkan keamanan sebagai kondisi yang dapat dibangun, melainkan lebih mementingkan menghindari ketidakstabilan sebagai kondisi yang harus dihindari. *Australian Realism* kurang tertarik pada elegansi atau konsistensi teoritis, tetapi lebih tertarik

pada pemahaman situasi-situasi spesifik di dunia luar. Secara metodologis, *Australian Realism* bersifat analitis agregatif atau proses pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber untuk membuat kesimpulan atau generalisasi yang lebih besar tentang suatu topik atau isu.. Para praktisi mengadopsi pendekatan *first principles* dalam menganalisis faktor-faktor dasar yang mereka lihat mempengaruhi dan membentuk hubungan internasional Australia. Kemudian mereka mencoba menggunakan pemahaman *first-principles* ini untuk menghasilkan wawasan tentang situasi dan tren internasional yang lebih kompleks (Wesley, 2009).

Pada akhirnya, strategi yang diadopsi oleh Realis Australia akan bergantung pada keadaan dan tantangan khusus yang dihadapi Australia pada setiap waktu tertentu. Pendekatan ini kemungkinan akan melibatkan kombinasi tindakan diplomasi, ekonomi, dan militer yang bertujuan untuk melindungi keamanan Australia dan memajukan kepentingannya di ranah internasional. Upaya Australia di Indo-Pasifik dalam konteks AUKUS dan ANZUS merupakan strategi baru yang ditempuh oleh Australia untuk memperkuat hubungan pertahanan dan keamanannya di wilayah tersebut. AUKUS adalah sebuah perjanjian keamanan tiga pihak antara Australia, Amerika Serikat, dan Inggris yang ditandatangani pada September 2021. Sedangkan ANZUS adalah perjanjian keamanan antara Australia, Amerika Serikat, dan Selandia Baru yang telah berlaku sejak tahun 1951. AUKUS bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan Australia, termasuk dalam hal teknologi nuklir, dan memperkuat kerja sama antara ketiga negara dalam menghadapi tantangan keamanan di wilayah

Indo-Pasifik, khususnya terkait dengan keamanan maritim dan peran Tiongkok di wilayah tersebut (Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia, 2021).

Sementara itu, ANZUS merupakan perjanjian keamanan tertua yang masih berlaku di wilayah Indo-Pasifik dan bertujuan untuk mempromosikan keamanan regional melalui kerja sama pertahanan dan keamanan antara ketiga negara. ANZUS juga telah mengalami perkembangan dan diperkuat melalui berbagai inisiatif dan kerja sama, seperti di bidang intelijen, keamanan maritim, dan penanganan bencana alam.

AUKUS juga memberikan manfaat strategis dalam hal pengembangan kemampuan pertahanan dan teknologi militer Australia yang lebih maju dan modern. Ini akan membantu meningkatkan kekuatan pertahanan Australia, yang sangat penting mengingat tantangan keamanan yang semakin kompleks di wilayah Indo-Pasifik. Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok telah meningkatkan kekuatan militernya dan memperluas pengaruhnya di wilayah tersebut, yang menimbulkan kekhawatiran di antara negara-negara lainnya di wilayah tersebut. Di bawah AUKUS, Australia akan menerima teknologi nuklir terbaru, termasuk kapal selam nuklir yang dikenal lebih efisien dan canggih dibandingkan dengan kapal selam konvensional yang digunakan saat ini. Selain itu, kerja sama AUKUS juga akan membantu Australia memperoleh keahlian teknologi tinggi dari Inggris dan Amerika Serikat, sehingga dapat meningkatkan kemampuan industri pertahanan Australia. Namun, AUKUS juga telah menimbulkan kekhawatiran dan kecemasan dari beberapa negara di wilayah Indo-Pasifik, termasuk Tiongkok dan Prancis. Tiongkok menganggap AUKUS sebagai bentuk permainan politik untuk mengurangi pengaruhnya di wilayah tersebut, sedangkan Prancis merasa

dikhianati oleh Australia yang membatalkan kontrak pembelian kapal selam konvensional dari Prancis. Kritik juga muncul di dalam negeri Australia, dengan beberapa pihak mempertanyakan keputusan tersebut dan meminta penjelasan lebih lanjut dari pemerintah.

Dalam menghadapi dinamika wilayah Indo-Pasifik yang semakin kompleks, Australia akan terus mengevaluasi strategi pertahanan dan keamanannya, termasuk melalui kerja sama AUKUS dan ANZUS. Namun, Australia juga perlu mempertimbangkan konsekuensi dari keputusan strategisnya dan menjaga hubungan yang baik dengan negara-negara lain di wilayah tersebut.

Meskipun ANZUS masih berlaku dan telah memberikan manfaat dalam mempromosikan keamanan regional, AUKUS dianggap sebagai tambahan dan penguatan strategi pertahanan dan keamanan Australia di wilayah Indo-Pasifik yang semakin kompleks dan dinamis. AUKUS memberikan keuntungan tambahan bagi Australia dengan mendapatkan akses teknologi nuklir dari Amerika Serikat dan Inggris, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pertahanannya dalam menghadapi ancaman keamanan yang semakin kompleks di wilayah tersebut. Selain itu, AUKUS juga memberikan sinyal kuat kepada negara-negara di wilayah Indo-Pasifik bahwa Australia, Amerika Serikat, dan Inggris bersatu dan berkomitmen untuk menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah tersebut. Hal ini juga diharapkan dapat mengirimkan pesan yang jelas dan kuat kepada Tiongkok terkait dengan peningkatan keamanan maritim dan memperkuat posisi Australia di wilayah Indo-Pasifik.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dalam penelitian ini yang membahas bagaimana Australia dalam mencapai kepentingannya melalui teori *Australian Realism*, dapat dianalisis untuk melihat peran Australia dalam mencapai kepentingannya melalui tiga instrumen dalam *Australian Realism* yaitu *Prudence*, *Powerlessness*, dan *Avoidance*. Jika dilihat melalui *Prudence*, Australia dalam kerja samanya dengan negara-negara kawasan dengan sikap berhati-hati melalui berbagai cara dalam bekerja sama dengan melakukan *Forward Defence* melalui AUKUS dan ANZUS, melalui kedua pakta pertahanan ini Australia menawarkan banyak manfaat bagi Australia itu sendiri. Kemakmuran kemiliteran sebagai mitra pertahanan Australia menjadi kekuatan militer baru setelah Amerika Serikat, kekuatan militer ini tentu menjadi arah pandangan Australia terhadap negara yang selama ini dinilai sebagai ancaman. Selain itu, Australia juga membangun hubungan baik dengan negara-negara kawasan melalui kerja sama militer regionalnya dengan ASEAN, dalam hal ini bentuk dukungan luar bagi Australia dalam mempertahankan eksistensinya di kawasan Asia Tenggara. Akan tetapi jika dilihat melalui *Australian Realism*, Australia dengan relasi tradisionalnya dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Selandia Baru dalam bentuk aliansi militernya menjadi salah satu kepentingan politik luar negeri yang memang justru menjadi rintangan dalam meningkatkan relasi pertahanan, ekonomi, dan politik dengan Tiongkok.

Dalam konteks instrumen *Powerlessness*, peran Australia dalam kerja sama AUKUS dan ANZUS dapat dilihat dari sudut pandang kekuasaan yang dimilikinya. Meskipun Australia telah bergabung dengan kedua pakta pertahanan ini, namun dalam kenyataannya Australia masih menghadapi beberapa kendala yang dapat membuatnya merasa tidak berdaya. Pertama, Australia masih bergantung pada Amerika Serikat dalam hal kemampuan militer. Walaupun Australia memiliki kemampuan militer yang cukup kuat, namun masih jauh di bawah kemampuan militer Amerika Serikat. Oleh karena itu, Australia masih membutuhkan bantuan dari Amerika Serikat dalam menghadapi ancaman militer yang lebih besar. Kedua, Australia juga menghadapi kendala dalam hal teknologi dan industri pertahanan. Dalam kerja sama AUKUS, Australia bertujuan untuk mendapatkan teknologi nuklir dan kapal selam yang lebih modern. Namun, hal ini membutuhkan investasi yang besar dan Australia tidak memiliki teknologi atau industri pertahanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ketiga, Australia juga menghadapi kendala dalam hal diplomasi dan hubungan internasional. Dalam kerja sama AUKUS, Australia bersama dengan Amerika Serikat dan Inggris, melakukan langkah yang kontroversial yang dapat memicu konflik dengan negara-negara lain, terutama Tiongkok.

Dilihat dari instrumen *Avoidance*, peran Australia dalam kerja sama AUKUS dan ANZUS dapat dilihat dari sudut pandang penghindaran konflik yang merugikan Australia. Melalui kerja sama AUKUS dan ANZUS, Australia dapat menghindari konflik dengan negara-negara yang dianggap sebagai ancaman. Dalam hal ini, Australia memanfaatkan kerja sama dengan Amerika Serikat dan Inggris untuk memperkuat posisinya dalam menjaga keamanan nasional dan

regional, sehingga dapat menghindari konflik yang merugikan Australia. Australia juga dapat menghindari konflik dengan negara-negara kawasan, terutama Tiongkok, dengan memperkuat hubungan kerja sama militer dengan negara-negara lain di kawasan. Melalui kerja sama militer regionalnya dengan ASEAN, Australia dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan negara-negara di kawasan, sehingga dapat menghindari konflik dengan Tiongkok yang dapat merugikan Australia secara ekonomi dan politik. Dalam kerja sama AUKUS dan ANZUS, Australia juga dapat menghindari konflik dengan negara-negara lain dalam hal teknologi dan industri pertahanan. Dalam hal ini, Australia memanfaatkan kerja sama dengan Amerika Serikat dan Inggris untuk mendapatkan teknologi dan kapal selam yang lebih modern, sehingga dapat menghindari konflik dengan negara-negara lain yang memiliki teknologi yang lebih maju. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa melalui tiga instrumen *Prudence*, *Powerlessness*, dan *Avoidance*, Australia memanfaatkan kerja sama dengan AUKUS dan ANZUS untuk menghindari konflik yang merugikan Australia, baik dengan negara-negara kawasan maupun negara-negara lain dalam hal keamanan, teknologi, dan industri pertahanan. Hal ini menunjukkan bahwa Australia menggunakan kerja sama tersebut sebagai alat untuk memperkuat kepentingan nasional dan regionalnya tanpa harus terlibat dalam konflik yang merugikan.

Jadi *Prudence*, *Powerlessness*, dan *Avoidance* terhadap Australia dapat menyimpulkan alasan AUKUS dan ANZUS dilakukan. Maka dari itu dengan teori *Australian Realism* dapat memungkinkan Australia untuk memainkan perannya sehingga dapat menyeimbangkan antara keempat negara dengan melakukan kedua

kerja sama bilateral, Dalam tabel dibawah akan menjelaskan rangkuman analisis yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3 Aplikasi Teori Australian Realism

Strategi	Pendekatan
<i>Prudence</i>	Australia cenderung mempertimbangkan aspek kehati-hatian setiap tindakan luar negerinya dan menghindari risiko yang tidak perlu. Dalam hal ini, AUKUS dan ANZUS memberikan jaminan keamanan bagi Australia, sehingga negara tersebut dapat fokus pada kebijakan ekonomi dan politik yang lebih menguntungkan dalam jangka panjang.
<i>Powerlessness</i>	Australia mengakui bahwa ia memiliki keterbatasan dalam kemampuan militer dan diplomasi dalam hubungan internasional. Dalam hal ini, AUKUS dan ANZUS memberikan kesempatan bagi Australia untuk bekerja sama dengan mitra yang lebih kuat dalam hal keamanan dan pertahanan.
<i>Avoidance</i>	Australia cenderung menghindari konflik yang tidak perlu dengan negara lain. Dalam hal ini, AUKUS dan ANZUS memberikan kesempatan bagi Australia untuk memperkuat kerja sama keamanan dan pertahanan dengan mitra yang sudah mapan dan stabil, sehingga menghindari konflik yang tidak perlu. Hal ini menunjukkan bahwa Australia menggunakan kerja sama tersebut sebagai alat untuk memperkuat posisinya dalam menjaga keamanan nasional dan regional, serta menghindari konflik dengan negara-negara yang dianggap sebagai ancaman, terutama Tiongkok.

sumber: (Wesley, 2009).

Dibantu dengan adanya *2016 Defence White Paper*, telah dijelaskan keterlibatan Australia dalam meningkatkan pertahanannya dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Selandia Baru serta keterlibatan dalam organisasi regional maupun Internasional. Penguatan aliansi antara Australia dengan negara-negara tersebut menunjukkan bahwa kekuatan Tiongkok yang kini terus menandingi Australia sehingga perlu adanya kekuatan lain di kawasan Indo-Pasifik. Pembangunan pangkalan militer AUKUS dan ANZUS di Australia membuktikan bahwa dengan Australia mendekatkan jangkauannya dengan negara-negara

Kawasan di Pasifik dapat meredam hegemoni yang dilakukan Tiongkok di Kawasan Pasifik. Melalui konsep teori ini dapat dilihat peran Australia dalam melakukan kerja sama keamanan dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Selandia Baru merupakan kepentingan akan keamanan regional, melalui adanya pangkalan militer dan beberapa kerja sama yang dilakukan di kawasan Pasifik dapat menjadi *balance of power* dan *control* dari adanya pakta pertahanan AUKUS dan ANZUS dalam membendung dan membatasi Tiongkok untuk kegiatannya di kawasan Indo-Pasifik. Australia sangat membutuhkan kedua pakta pertahanan melihat kepentingan Australia dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Selandia Baru terhadap Tiongkok, ini menjadi alasan utama teori *Australian Realism* dapat membantu Australia menentukan arahnya dalam kedua pakta pertahanan. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan dua kepentingan sekaligus dalam menjaga eksistensi keamanan Australia di Kawasan, serta mengakomodasi kerja sama antara keempat negara di Kawasan Asia-Pasifik.

Forward Defence sangat mungkin dilakukan karena keduanya antara AUKUS dan ANZUS akan terus mempunyai kepentingan yang sama. Oleh karena itu Australia menjadi pihak pertama dalam memberikan penengah bagi keduanya, karena AUKUS maupun ANZUS mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, AUKUS dengan teknologi dan pertahanan dan ANZUS dengan superior militer antara tiga negara anggota. Oleh karena itu dengan apa yang sedang terjadi dengan Tiongkok akan menjadi peluang yang bagus bagi Australia dalam menunjukkan perannya sebagai *middle power* di kawasan Indo-Pasifik. Hal ini bisa menjadi kesempatan Australia dalam mengatur ulang kebijakan luar

negerinya, sehingga sangat penting bagi Australia dalam memahami kekuatan dan kelemahan dari kedua pakta pertahanan tersebut tanpa meninggalkan keduanya.

4.2 Rekomendasi Penelitian

Merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwasanya penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan, terutama pada sumber bacaan yang semuanya tidak dapat terbuka oleh pihak-pihak terkait. Saran dan rekomendasi dari penelitian ini tentunya sangat diharapkan nantinya untuk membantu memperbaiki penelitian selanjutnya dengan tema yang serupa. Penelitian ini hanya berfokus pada upaya Australia dalam menjaga politik keamanan internasionalnya melalui AUKUS dan ANZUS dengan menggunakan teori *Australian Realism* dan mendapatkan hasil bahwa Australia dalam politik keamanan internasionalnya melawan dominasi dari Tiongkok memberikan peran penting kedua pakta pertahanan. Australia sendiri menjaga hubungan baik dengan keempat negara agar keamanan negara tidak terancam oleh negara super power di waktu yang akan datang. Pada penelitian selanjutnya diharapkan bisa lebih baik dalam meneliti tema yang serupa dengan rentang waktu penelitian terkini.

DAFTAR PUSTAKA

- Nam Hyun-woo. 23 September 2021. "AUKUS comes as pressure on Seoul to join anti-China campaign"
https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2023/06/113_315914.html
- Stephen Dziedzic. 20 September 2021. "Australia seeks to allay Southeast Asian concerns over AUKUS nuclear submarine deal"
<https://www.abc.net.au/news/2021-09-20/australia-ambassador-asean-aukus-statement/100477086>
- Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. 16 September 2021. "Foreign Ministry Spokesperson Zhao Lijian's Regular Press Conference"
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/202207/t20220725_10727739.html
- Tanvi Madan. 24 September 2021. "India, the Quad and AUKUS"
<https://www.lawfaremedia.org/article/india-quad-and-aukus>
- Aie Balagtas See. 21 September 2021. "Philippines throws support behind AUKUS pact"
<https://www.benarnews.org/english/news/philippine/philippines-southeast-asia-reactions-aukus-09212021134231.html>
- Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. 17 September 2021. "Statement on Australia's Nuclear-powered Submarines Program"
https://kemlu.go.id/portal/en/read/2937/siaran_pers/statement-on-australian-nuclear-powered-submarines-program
- Allan Behm, Peter Lewis, Katherine Murphy. 28 September 2021. "Majority back Aukus submarine pact, but fear it will inflame tensions with China."
- Cheng, M. 2021. "AUKUS: The Changing Dynamic and Its Regional ."
- House of Commons. 21 September 2021. "Defence Committee, Oral evidence: The Navy: purpose and procurement."
<https://committees.parliament.uk/oralevidence/2758/html/>
- Julienne, Marc. 21 September 2021. "AUKUS Rocks the Boat in the Indo-Pacific."
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/julienne_aukus_indopacific_2021.pdf
- Louisa Brooke-Holland, John Curtis, Claire Mills. 2021. "The AUKUS Agreement."

- Murphy, Katherine. 27 September 2021. "Essential poll: majority of Australians back Aukus submarine pact, but fear it will inflame tensions with China."
- Michael Wesley. 2009. "The Rich Tradition of Australian Realism"
- Malcolm Davis. 2019. "Forward defence in depth for Australia"
- Major Jeremy "JB" Brown. 2020. "AN ANALYSIS OF AUSTRALIAN DEFENSE POLICY FROM 1901 TO PRESENT"
- Commonwealth of Australia. 2021. "2021–25 Defence Corporate Plan"
- Commonwealth of Australia. 2020. "2020 Defence Strategic Update"
- Muamar Khadafi. 2022. "STRATEGI AUSTRALIA DALAM MENDUKUNG HEGEMONI AMERIKA SERIKAT DI KAWASAN INDO-PASIFIK TAHUN 2018-2021"
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/41675/18323206.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Paavo Van Der Eecken. 2019. "POPULATE OR PERISH A QUANTITATIVE ANALYSIS OF THE DISCOURSE ON MIGRATION IN POSTWAR AUSTRALIAN NEWSPAPERS"
https://libstore.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/790/086/RUG01-002790086_2019_0001_AC.pdf
- Paavo Van Der Eecken. 2019. "Re-evaluating the contribution and legacy of Hedley Bull"
http://socialsciences.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-38212008000100005
- Lowy Institute. 2021. "AUKUS Polling"
<https://poll.lowyinstitute.org/charts/aukus/>
- Global Firepower. 2021. "Australia Military Strength"
http://www.dzkorea.org/en/media/industry.asp?B_CODE=TB_BUSINESS_EN_2018&IDX=34&gotopage=1&mode=view&search_string=
- Emerson Maione de Souza. 2008. "Re-evaluating the Contribution and Legacy of Hedley Bull"
https://www.researchgate.net/publication/250053668_Re-evaluating_the_Contribution_and_Legacy_of_Hedley_Bull
- Wayne McLean. 2015. "Neoclassical realism and Australian foreign policy: understanding how security elites frame domestic discourses"
https://www.researchgate.net/publication/284722826_Neoclassical_realism_and_Australian_foreign_policy_understanding_how_security_elites_frame_domestic_discourses

Elleke Boehmer. 2010. "J. M. Coetzee's Australian Realism"

https://www.researchgate.net/publication/293423345_J_M_Coetzee's_Australian_realism

Commonwealth of Australia. 2017. "2017 Foreign Policy White Paper"

<https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/minisite/static/4ca0813c-585e-4fe1-86eb-de665e65001a/fpwhitepaper/pdf/2017-foreign-policy-white-paper.pdf>

Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade. "Australia's free trade agreements (FTAs)"

<https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/trade-agreements>